

EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN MONITORING KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PAD KOTA BANDUNG TAHUN 2023

Adji Firmansyah¹, Muhammad Alka Gustiyan Rojabi²,
Eva Hany Fanida³, Revienda Anita Fitrie⁴
^{1, 2, 3, 4}Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
Email: 25040674248@mhs.unesa.ac.id

Article History

Received: 02-05-2026

Revision: 12-02-2026

Accepted: 15-05-2026

Published: 18-05-2026

Abstract. Local Own-Source Revenue (PAD) is a key indicator of local government fiscal autonomy and is significantly influenced by the effectiveness of financial oversight and monitoring. This study aims to analyse the effectiveness of local financial oversight and monitoring in driving an increase in Bandung City's PAD in 2023. The study employs a qualitative approach using a documentary study method. Data was collected through a review of PAD realisation reports, the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) documents, internal oversight reports, and regulations relating to local revenue management. The data was analysed descriptively and analytically by comparing PAD realisation achievements against the oversight mechanisms and monitoring systems implemented during 2023. The research findings indicate that strengthening internal oversight and implementing a digital monitoring system contribute positively to increasing PAD, particularly in the local tax sector. More systematic reporting and monitoring transparency encourages improved compliance and reduces the potential for revenue leakage. However, this study also identified constraints regarding limited human resources and data integration between agencies. Overall, effective financial oversight and monitoring play a crucial role in supporting accountable and sustainable increases in PAD.

Keywords: Effectiveness, Supervision, Monitoring, Local Own-Source Revenue, Regional Finance, Bandung City

Abstrak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting kemandirian fiskal pemerintah daerah dan sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan serta monitoring keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan dan monitoring keuangan daerah dalam mendorong peningkatan PAD Kota Bandung tahun 2023. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumentasi. Data dikumpulkan melalui penelaahan laporan realisasi PAD, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan pengawasan internal, serta regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan membandingkan capaian realisasi PAD terhadap mekanisme pengawasan dan sistem monitoring yang diterapkan selama tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan pengawasan internal dan penerapan sistem monitoring berbasis digital berkontribusi positif terhadap peningkatan PAD, terutama pada sektor pajak daerah. Transparansi pelaporan dan pemantauan yang lebih sistematis mendorong peningkatan kepatuhan serta menekan potensi kebocoran pendapatan. Namun, penelitian ini juga menemukan kendala pada keterbatasan sumber daya manusia dan integrasi data antarinstansi. Secara keseluruhan, pengawasan dan monitoring keuangan yang efektif berperan penting dalam mendukung peningkatan PAD yang akuntabel dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Monitoring, PAD, Keuangan Daerah, Kota Bandung

How to Cite: Firmansyah, A., Rojabi, M. A. G., Fanida, E. H., & Fitrie, R. A. (2026). Efektivitas Pengawasan dan Monitoring Keuangan Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kota Bandung Tahun 2023. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7 (3), 3540-3547. <http://doi.org/10.54373/imeij.v7i3.5573>

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan membiayai pembangunan serta pelayanan publik sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah. Dalam konteks ini, kemandirian fiskal menjadi tuntutan utama agar daerah tidak bergantung secara berlebihan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang sebagai indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Meskipun secara regulatif PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan sah lainnya, realisasi PAD di banyak daerah masih menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa studi menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya sistem pengendalian internal, serta potensi kebocoran penerimaan daerah menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi PAD (Halim, 2012; Nordiawan & Hertianti, 2018). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya potensi ekonomi daerah tidak secara otomatis menjamin tingginya penerimaan daerah apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan monitoring keuangan yang efektif.

Pengawasan dan monitoring keuangan daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses pengelolaan pendapatan berjalan sesuai dengan ketentuan serta target yang telah ditetapkan. Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa pengelolaan keuangan sektor publik yang baik harus berlandaskan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Sejalan dengan itu, Mahmudi (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian dan monitoring yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mendeteksi permasalahan sejak dini serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Tanpa mekanisme pengawasan dan monitoring yang memadai, potensi penyimpangan dan inefisiensi pengelolaan pendapatan daerah sulit dihindari.

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Kota Bandung memiliki potensi ekonomi yang signifikan, khususnya di sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya menjamin optimalnya realisasi PAD. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas pengawasan dan monitoring keuangan daerah telah berkontribusi terhadap peningkatan PAD, terutama dalam konteks tata kelola keuangan daerah yang semakin dituntut transparan dan akuntabel.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas pengelolaan PAD dari perspektif kebijakan fiskal, kepatuhan pajak, atau kinerja keuangan daerah secara umum. Namun, kajian yang secara spesifik menelaah peran pengawasan dan monitoring keuangan daerah terhadap peningkatan PAD, khususnya dengan fokus pada satu daerah dan periode tertentu, masih relatif terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai efektivitas pengawasan dan monitoring keuangan daerah dalam mendorong peningkatan PAD Kota Bandung pada tahun 2023, dengan menekankan keterkaitan antara mekanisme pengawasan, sistem monitoring, dan capaian realisasi pendapatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi penguatan tata kelola keuangan daerah serta menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan peningkatan PAD yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami dan menjelaskan secara mendalam bagaimana pengawasan dan monitoring keuangan daerah dilaksanakan serta sejauh mana perannya dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tahun 2023. Fokus penelitian tidak hanya pada capaian PAD, tetapi juga pada proses, mekanisme, dan praktik pengawasan serta monitoring yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data tersebut diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah, meliputi laporan keuangan pemerintah daerah, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan realisasi PAD, serta regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Selain itu, data pendukung diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan dan dokumen pengawasan yang dikeluarkan oleh lembaga terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah pustaka. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan menelaah data keuangan serta laporan pengawasan yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, telaah pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengawasan, monitoring keuangan daerah, dan PAD. Kedua teknik ini digunakan secara saling melengkapi agar data yang diperoleh bersifat komprehensif dan kontekstual. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan aspek pengawasan, sistem monitoring, dan capaian PAD. Selanjutnya, data dianalisis dengan menelaah keterkaitan antara mekanisme

pengawasan dan monitoring dengan realisasi PAD, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Melalui proses analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas pengawasan dan monitoring keuangan daerah dalam mendukung peningkatan PAD Kota Bandung secara akuntabel.

HASIL DAN DISKUSI

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Tingkat pencapaian PAD dapat menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola potensi ekonomi lokal sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Pada wilayah Bandung, Optimalisasi PAD menjadi hal yang strategis mengingat tingginya aktivitas ekonomi pada sektor perdagangan, jasa, pariwisata, hiburan, serta usaha kuliner. Untuk melihat sejauh mana capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung pada tahun 2023, penting untuk membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang berhasil dicapai hingga pertengahan tahun. Pemerintah Kota Bandung menetapkan target PAD sebesar Rp2,4 triliun sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Hingga triwulan II, realisasi PAD menunjukkan adanya perkembangan yang cukup baik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan daerah masih terus tumbuh, meskipun belum sepenuhnya mencapai tingkat yang diharapkan.

Perkembangan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan, terutama dari sektor pajak daerah yang menjadi penyumbang terbesar. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi tersebut, rincian target dan realisasi PAD Kota Bandung tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung 2023

No	Uraian	Nilai
1	Target PAD Tahun 2023	Rp. 2.400.000.000.000
2	Realisasi PAD Triwulan II	Rp. 893.000.000.000
3	Presentase Capaian	37%
4	Realisasi Periode Sama Tahun Sebelumnya	Rp. 800.000.000.000
5	Kenaikan Dibanding Tahun Sebelumnya	Rp. 93.000.000.000

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat bahwa capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung hingga pertengahan tahun masih berada di bawah 50 persen dari target tahunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi PAD belum berjalan optimal dan mengindikasikan perlunya penguatan strategi pengelolaan pendapatan daerah. Struktur PAD yang masih

didominasi oleh pajak daerah mencerminkan besarnya ketergantungan pemerintah kota pada sektor-sektor ekonomi seperti hotel, restoran, parkir, hiburan, dan perdagangan. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian mengenai kondisi awal PAD, sekaligus menunjukkan bahwa besarnya potensi ekonomi belum secara otomatis berbanding lurus dengan tingkat realisasi pendapatan apabila tidak didukung oleh pengawasan dan monitoring yang efektif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan dan monitoring keuangan daerah memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan PAD. Pengawasan yang dilakukan secara rutin, baik melalui audit internal maupun pemeriksaan administrasi, terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan. Penerapan sistem monitoring berbasis digital juga memperkuat keterbukaan informasi dan memudahkan proses pelaporan, sehingga setiap tahapan pemungutan pendapatan dapat ditelusuri dengan lebih jelas. Hal ini menjawab pertanyaan penelitian terkait bagaimana pengawasan dan monitoring berkontribusi terhadap tata kelola pendapatan daerah yang lebih akuntabel.

Pengawasan yang konsisten berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penagihan aktif terhadap wajib pajak yang menunggak serta pengawasan yang berkelanjutan mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan dan monitoring tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian perilaku yang berpengaruh terhadap realisasi PAD. Dengan demikian, pertanyaan penelitian mengenai dampak pengawasan dan monitoring terhadap peningkatan PAD dapat dijawab melalui temuan bahwa kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor kunci yang terdorong oleh sistem pengawasan yang efektif.

Monitoring yang dilakukan secara berkala memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau perkembangan penerimaan secara lebih cepat dan akurat. Informasi yang tersedia secara real time membantu dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang belum mencapai target atau mengalami penurunan penerimaan. Hal ini memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi pemungutan pendapatan. Evaluasi yang berkelanjutan juga berperan dalam mengendalikan capaian PAD agar tetap berada pada jalur perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengawasan dan monitoring keuangan daerah terbukti berkontribusi dalam menjaga konsistensi pencapaian target PAD serta meminimalkan potensi penyimpangan, yang sekaligus menjawab pertanyaan penelitian mengenai efektivitas pengawasan dan monitoring dalam mendukung peningkatan PAD Kota Bandung.

Meskipun memberikan dampak positif, pelaksanaan pengawasan dan monitoring keuangan daerah masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain :

- Keterbatasan sumber daya manusia; jumlah aparatur yang bertugas melakukan pengawasan belum sepenuhnya sebanding dengan banyaknya objek pajak yang harus diawasi. Hal ini menyebabkan pengawasan di lapangan belum dapat dilakukan secara optimal.
- Integrasi data yang belum optimal; sistem informasi yang digunakan oleh berbagai instansi belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Akibatnya, data yang tersedia terkadang tidak sinkron sehingga dapat menghambat proses pengambilan keputusan.
- Tingkat kepatuhan wajib pajak; masih terdapat sebagian wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Hal ini berdampak pada munculnya tunggakan dan berpotensi mengurangi penerimaan daerah.
- Aktivitas ekonomi informal; sebagian aktivitas ekonomi yang berkembang di masyarakat belum tercatat secara resmi dalam sistem perpajakan daerah. Kondisi ini menyebabkan potensi PAD yang sebenarnya cukup besar belum sepenuhnya tergal.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengawasan dan monitoring keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan PAD Kota Bandung. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan perbaikan yang berkelanjutan, baik dari sisi sistem, sumber daya manusia, maupun integrasi data. Dengan pengelolaan yang lebih baik, diharapkan penerimaan daerah dapat terus meningkat dan mampu mendukung pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan monitoring keuangan daerah berperan penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tahun 2023. Meskipun realisasi PAD menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut belum optimal karena pada pertengahan tahun belum mencapai setengah dari target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi pendapatan daerah belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Pelaksanaan pengawasan melalui audit internal, pemeriksaan administrasi, dan penagihan pajak terbukti berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menekan potensi kebocoran penerimaan. Selain itu, penerapan sistem monitoring berbasis digital memudahkan pemerintah daerah dalam memantau perkembangan penerimaan secara lebih cepat, akurat, dan transparan.

Efektivitas pengawasan dan monitoring masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya integrasi data antarinstansi, serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum merata. Keberadaan aktivitas ekonomi informal yang belum tercatat juga menunjukkan masih adanya potensi PAD yang belum tergali. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan monitoring perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui perbaikan sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengelolaan data yang lebih terintegrasi. Upaya tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerah, memperkuat kinerja keuangan pemerintah daerah, serta mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

REKOMENDASI

Untuk mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan dan monitoring keuangan melalui pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi antarinstansi agar pencatatan dan pelaporan pendapatan menjadi lebih akurat dan transparan. Peningkatan kualitas dan jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan juga penting agar pengendalian di lapangan berjalan efektif. Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi yang berkelanjutan serta penyederhanaan dan digitalisasi layanan perpajakan. Inovasi pengawasan berbasis teknologi, khususnya pada sektor-sektor ekonomi potensial, serta pendataan sektor informal yang belum tergarap juga perlu dilakukan. Evaluasi kinerja penerimaan daerah secara berkala menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi kendala dan menentukan strategi perbaikan. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan PAD secara lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
Link: <https://scholar.google.com/scholar?q=Akuntansi+Keuangan+Daerah+Abdul+Halim>
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat. (2023, September 8). PAD Kota Bandung sudah capai Rp893 miliar dari target Rp2,4 triliun. Link: <https://jabar.bpk.go.id/pad-kota-bandung-sudah-capai-rp-893-miliar-dari-target-rp24-triliun/>
- Binawati, E., & Badriyah, N. (2022). Pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 32–49.
Link: [Baca Jurnal](#)
- Deddi Nordiawan., & Hertianti, A. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
Link: <https://scholar.google.com/scholar?q=Akuntansi+Sektor+Publik+Nordiawan>

- Jannah, A., & Iryani, L. (2019). Pengawasan pemerintah daerah terhadap pajak kafe dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*.
Link: <https://ojs.unimal.ac.id/na/article/view/3061>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Data Keuangan Pemerintah Daerah.
Link: <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Link: <https://scholar.google.com/scholar?q=Analisis+Laporan+Keuangan+Pemerintah+Daerah+Mahmudi>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
Link: <https://scholar.google.com/scholar?q=Akuntansi+Sektor+Publik+Mardiasmo>
- Ramdan, A., Wulandari, W., & Putra, A. B. (2023). Analisis pengawasan pemungutan pajak restoran dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok 2019–2022. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. <https://doi.org/10.54259/akua.v4i3.4588>
- Supraja, G. (2019). Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan efektivitas fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*
Link: <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/577>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. (2014). Pemerintahan Daerah.
Link: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>